Bulletin
Parlementaria

Pertamina Didorong Lakukan Digitalisasi & Revitalisasi Kilang Minyak

Nomor 1253/I/VII/2023 • Juli 2023

3 Kerusuhan di Prancis Meluas, DPR Tekankan Prioritas Selamatkan WNI

6 Gus Imin Minta KPU-Kemendagri Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP

Pertamina Didorong Lakukan Digitalisasi & Revitalisasi Kilang Minyak

FOTO:IST/MAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke PT. Pertamina (persero) RU II Dumai, Provinsi Riau, Jumat (7/7/2023).

Komisi VII DPR RI meminta Pertamina *Refinery Unit* (RU) II Dumai menindaklanjuti kejadian ledakan kebakaran beberapa waktu lalu di kilang RU II Dumai. Hal ini menjadi perhatian Komisi VII, dimana diketahui sebelumnya kejadian yang sama di Kilang Plumpang. Adapun menurut Pertamina, infrastruktur kilang mereka di sini sudah sangat tua dan tentu perlu *upgrading* dan revitalisasi kilang.

"*Upgrading* dan revitalisasi kilang tentu ini menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga jangan sampai terjadi lagi insiden-insiden kebakaran dan ledakan. Kita tahu kilang di Dumai ini kan penyumbang 15% dari pada kebutuhan BBM nasional. Jadi kalau terjadi masalah maka akan mengganggu pasokan BBM nasional," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke PT. Pertamina (persero) RU II Dumai, Provinsi Riau, Jumat (7/7).

Lebih lanjut Mukhtarudin menjelaskan menjadi fokus Komisi VII adalah tentang teknologi di zaman sekarang. "Kan sudah digitalisasi kita mendorong agar Pertamina kilang ini melakukan upgrading terhadap teknologi yang mereka miliki artinya digitalisasi yang terbaru dan lengkap bisa mendeteksi secara dini apa yang akan terjadi saya kira itu menjadi sebuah kebutuhan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan *upgrading* dan revitalisasi kilang nanti akan dibicarakan kembali dengan Dirut Pertamina Holding. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan untuk meminimalkan juga menjaga jangan sampai mengganggu dari pada produksi kilang minyak.

"Tentunya teknologi di jaman sekarang semuanya sudah digital dan kita akan mendorong adanya sebuah revitalisasi di kilang-kilang yang teknologinya jauh ketinggalan, juga banyak kilang-kilang yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat kemudian kalau lihat dari penjelasan pihak Pertamina kilang Dumai penyebab kejadian ledakan akibat korosi atau perkaratan. Sehingga ada pipa yang sudah aus yang rentan terjadi sebuah bocor menimbulkan ledakan, ini kan harusnya tidak terjadi kalau ada deteksi dini kemudian ini bukan *human error* tapi karena infrastrukturnya yang tua," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kilang di Dumai ini sudah berdekatan dengan pemukiman masyarakat, tentu ini perlu ada *buffer zone* minimal 50 meter dari batas tembok yang ada. "PT. Pertamina juga harus dapat melakukan negosiasi pembicaraan dan advokasi sosial ke masyarakat agar masyarakat juga mau relokasi, kemudian tertentu dengan cara-cara yang tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu tentu dialog sosialisasi koordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah kota agar dilakukan relokasi," pungkasnya.

man/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya

Kerusuhan di Prancis Meluas, **DPR Tekankan Prioritas Selamatkan WNI**

FOTO: DOK/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis untuk terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebab, kerusuhan dan bentrokan dinilai semakin meluas di negara tersebut akibat kematian remaja yang ditembak polisi setempat.

"Keselamatan WNI yang ada di Prancis harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberi jaminan warga negara kita tidak terkena dampak kerusuhan di Prancis yang terus meluas," tutur Puan, Selasa (4/7).

Seperti diketahui, kerusuhan di Prancis dipicu karena penembakan polisi yang menyebabkan pemuda berusia 17 tahun meninggal dunia pada 27 Juni lalu. Kejadian itu menimbulkan amuk massa dan kerusuhan di beberapa kota besar di Prancis sejak 28 Juni 2023 dan terus membesar, termasuk di Paris pada Jumat (30/6) lalu.

Berdasarkan catatan KBRI, jumlah WNI yang berada di Prancis mencapai 4.000 jiwa dan tersebar di beberapa kota. Oleh karena itu, Puan meminta kedutaan besar tetap memberikan pelayanan bagi WNI di Prancis, khususnya yang lokasinya dekat dengan kerusuhan.

Kerusuhan di Prancis telah turut menyebabkan 7 negara mengeluarkan *travel advisory* dan *warning*. Ketujuh negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Australia, Skotlandia dan Iran. "Jangan sampai WNI yang lokasi tempat tinggalnya terdampak kerusuhan kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Ini juga harus menjadi fokus KBRI dalam menjamin kebutuhan para warga negara kita di sana," jelasnya. **ts/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Terima Delegasi Parlemen Jepang, Lodewijk Sampaikan Peningkatan Hubungan dan Situasi Hankam Kawasan Kedua Negara

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus ditemani Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Delegasi dan Anggota Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Mr. Wada Yoshiaki (*Head of Delegation*). Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai peningkatan hubungan bilateral Jepang-Indonesia dan perkembangan situasi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di kawasan kedua negara. Mereka sepakat untuk saling berbagi informasi, meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana, serta memperkuat kapasitas maritim.

Selain persoalan Hankam, juga dibahas mengenai persoalan nilai kebebasan, demokrasi, HAM, supremasi hukum, serta berkomitmen terhadap pembangunan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik, termasuk memperkuat hubungan politik dan diplomasi melalui dialog reguler dan pertukaran pandangan. Selain itu, Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

"Hubungan Antarparlemen Indonesia-Jepang sudah berlangsung lama dan bersifat konstruktif. Sejauh ini, parlemen kedua negara senantiasa memberikan dukungan dan penguatan kepada pemerintah kedua negara dalam upaya peningkatan kerjasama bilateral kedua negara," jelasnya usai pertemuan dengan delegasi Jepang, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (27/6).

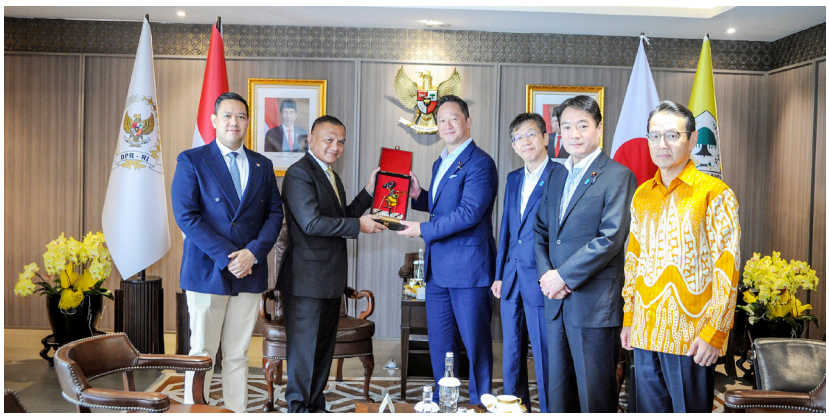

FOTO: MRO/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Delegasi dan Anggota Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Mr. Wada Yoshiaki (Head of Delegation) di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Dikatakannya, DPR sendiri telah memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara parlemen Indonesia dengan Jepang. Melalui GKSB Indonesia-Jepang, DPR telah menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan antara kedua negara.

"Terlebih pada tahun 2023 ini, Indonesia-Jepang memperingati 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Kesempatan ini dapat menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lodewijk juga menambahkan, kehadiran parlemen kedua negara dalam masalah diplomatik sangat dibutuhkan. Sebab parlemen tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan pendukung kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai instrumen yang penting dalam memperkuat hubungan antara masyarakat (*people to people*), khususnya antara generasi muda.

"Dalam kerangka itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan pada hari ini yang saya nilai akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, yang rencananya akan bertukar pikiran terhadap beberapa hal dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara dalam menghadapi tantangan masa depan," sambungnya.

we/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Sufmi Dasco Kunjungi Tenda Jemaah Haji di Mina, Ini Temuannya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau pemondokan jemaah haji Indonesia di sejumlah Maktab yang ada di Mina, Kamis (29/6). Berbagai keluhan disampaikan jemaah, utamanya soal toilet dan sesaknya tenda. Dasco dan rombongan awalnya berkunjung ke Maktab 48 yang ditempati jemaah dari wilayah Jakarta dan Banten. Di bawah terik matahari yang lebih dari 40 derajat celcius, Dasco dan rombongan membuka tenda, meninjau toilet, dan berinteraksi dengan jemaah

Jemaah mengadukan sejumlah masalah di Maktab ke Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Di antara masalah yang diadukan adalah soal toilet yang mampet dan antreannya panjang hingga soal sesaknya tenda. Dasco juga sempat berinteraksi dengan jemaah yang sakit dan sedang dirawat di tenda fasilitas kesehatan. Dia juga berkunjung ke beberapa tenda dan bertanya soal permasalahan jemaah.

Dari Maktab 48, Dasco dan para Anggota Timwas Haji DPR berkunjung ke Maktab 42 yang ditempati jemaah asal Jawa Timur dan Aceh. Di sana, Dasco juga mengecek tenda, toilet, dan fasilitas kesehatan.

Pemandangan miris menyambut rombongan saat mengecek toilet perempuan. Di samping toilet ada sejumlah jemaah haji perempuan yang menggelar kasur dan tidur di sana. Saat dihampiri dan ditanya, mereka mengatakan tak kebagian tidur di dalam tenda. Sejak semalam para jemaah perempuan ini tidur di samping toilet.

FOTO: OJI/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau pemondokan jemaah haji Indonesia di Mina.

Lalu ada juga jemaah yang mengadukan belum mendapat jatah makanan sejak Rabu (28/6) malam. Jemaah bernama Abdullah itu meminta tolong Timwas Haji DPR mengupayakan komunikasi dengan panitia haji agar jatah makanan untuk tendanya datang.

Masalah yang ditemui Dasco dan rombongan Timwas Haji DPR dari dua Maktab itu mirip-mirip, yaitu toilet mampet dan antreannya panjang, tenda yang penuh sesak, dan juga pembagian makanan yang tak merata. Dasco mengatakan perlu ada perbaikan pengelolaan haji di masa depan.

"Saya melihat bahwa karena jemaah Indonesia itu banyak sekali, dan juga fasilitas yang ada di sini memang terbatas, saya lihat petugas-petugas kita walaupun sudah bekerja dengan baik, Kementerian Agama juga sudah menjalankan fungsinya, tetapi saya rasa ada baiknya di tahun-tahun mendatang ditangani oleh yang lebih profesional agar segala sesuatu yang belum sempurna bisa disempurnakan," kata Dasco.

Dasco menegaskan sejumlah hal yang menjadi temuan Timwas Haji DPR menurut Dasco akan dbahas setelah kembali ke Jakarta. Saat ini Tim Pengawas Haji masih melakukan pengawasan-pengawasan untuk menginventarisasi lebih banyak lagi temuan untuk bahan evaluasi.

oji/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Gus Imin Minta KPU-Kemendagri **Tindaklanjuti** Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP

FOTO:IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu. 4 juta DPT ini tanpa e-KTP ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi agar kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi di Pemilu," kata politisi yang akrab disapa Gus Imin melalui keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria** pada Selasa (4/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Dukcapil) di berbagai daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat melakukan sinkronisasi DPT dengan data penduduk guna menyelamatkan hak suara jutaan pemilih baru.

"Mumpung masih ada waktu, saya kira semua *stakeholder* terkait seperti KPU dan juga Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu," tegasnya.

Di sisi lain, Gus Imin juga meminta KPU untuk mengantisipasi penambahan atau pengurangan data pemilih, mengingat data yang disebutkan oleh Kemendagri bersifat dinamis dan masih ada waktu hingga dua tahun ke depan. Ia juga mengingatkan setiap penyelenggara Pemilu untuk memaknai banyaknya masyarakat yang akan menjadi pemilih sebagai momentum untuk meningkatkan penggunaan hak suara dalam pemilu mendatang.

"Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita," pungkas legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan empat juta lebih warga yang masuk DPT belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hal ini berdasarkan hasil pencermatan pemilih potensial non e-KTP berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty juga menjelaskan jutaan DPT yang belum memiliki e-KTP merupakan pemilih baru. Saat ini melakukan belum melakukan perekaman KTP elektronik namun telah usia 17 tahun saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. **uc/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Gobel Ingatkan Kembali Bahaya Pinjol Ilegal: Jangan Mudah Tergoda Iming-Iming!

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, kembali mengingatkan masyarakat terkait bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong.

"Jangan mudah tergoda iming-iming pinjol, terutama yang ilegal. Rakyat Gorontalo merupakan salah satu sasaran pinjol ilegal dan investasi bodong," kata Gobel, saat memberikan sambutan dalam acara yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Minggu (25/6).

Gobel menilai sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, Gorontalo merupakan salah satu target jasa pinjol maupun investasi bodong. Banyak warga Gorontalo tertipu investasi bodong maupun pinjol ilegal. Bahkan pada 12 Juni, seorang wanita berusia 23 tahun dari Gorontalo ditemukan tewas gantung diri yang diduga karena terjerat pinjol.

FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel saat memberikan sambutan dalam acara yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Minggu (25/6/2023).

> JANGAN MUDAH TERGODA IMING-IMING PINJOL, TERUTAMA YANG ILEGAL. RAKYAT GORONTALO MERUPAKAN SALAH SATU SASARAN PINJOL ILEGAL DAN INVESTASI BODONG.

Scan QR untuk berita selengkapnya

Masih tingginya pinjol dan investasi bodong di Gorontalo mendorong Rachmad Gobel selaku wakil rakyat dari Gorontalo meminta OJK untuk lebih aktif lagi melakukan literasi jasa keuangan di Gorontalo. "Masyarakat jangan mudah terpancing pinjol," kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, Gobel juga meminta masyarakat agar jangan mewariskan utang ke anak-cucu serta terkurasnya aset keluarga akibat terjerat utang dengan bunga yang sangat besar. "Kita justru harus menyiapkan masa depan yang baik bagi generasi penerus kita. Siapkan mereka agar menjadi manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang baik dan terjaminnya kesehatan mereka," imbuhnya.

Gobel mengatakan, masalah pinjol dan investasi bodong itu jangan dianggap enteng dan jangan diremehkan. Dari sisi masyarakat, jangan tergoda kemudahan dan tipuan keuntungan cepat serta berlipat. "Tidak ada yang instan. Semua harus berkeringat," ujarnya.

Dari sisi pemerintah dan negara, lanjut Gobel, harus konsisten melakukan literasi jasa keuangan dan penegakan hukum. "Harus ada upaya terus menerus untuk preventif dan tindakan yang tegas untuk kuratif," katanya. **rdn**

Farhan Akui Dunia Kewalahan Hadapi Kemajuan Teknologi Digital

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai pesatnya perkembangan teknologi digital membuka peluang besar terhadap kemajuan. Namun, teknologi digital juga membawa tantangan besar, termasuk dalam membuat produk legislasi untuk mengaturnya.

"Pertanyaan besarnya, bagaimana AI (*artificial intelligence*/kecerdasan buatan) dan akibat hukumnya? Negara harus merespons hal itu. Sayangnya responsnya masih normatif. Saya khawatir kita memang belum terlalu menguasai, apa yang harus kita lakukan menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini," ujar Farhan dalam diskusi bertajuk 'Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan' yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, di Jakarta, Rabu (21/6).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (23/6) itu, Farhan khawatir cepatnya perkembangan teknologi digital tidak bisa diimbangi dengan pembuatan produk hukum untuk mengaturnya. Kemampuan legislator harus terus di perbarui mengejar perkembangan zaman. "Rasanya cukup sulit kemampuan legislasi kita mengejar cepatnya perkembangan teknologi," ujarnya.

> RASANYA CUKUP SULIT KEMAMPUAN LEGISLASI KITA MENGEJAR CEPATNYA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan.

FOTO: OJI/PDT

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, kesulitan dalam membuat produk legislasi terkait teknologi digital tidak hanya dialami Indonesia. Menurutnya, seluruh negara di dunia mengalami kebimbangan dalam hal itu. Ia mencontohkan terkait concern pembuatan UU dengan mempertimbangkan kebebasan dan perlindungan. Kebimbangan juga terjadi dalam pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE).

"Setiap pembentukan legislasi memang selalu menghadapi dilema yang luar biasa. Seperti yang kita alami sekarang saat membahas revisi UU ITE, yaitu dilema antara kebebasan versus perlindungan," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pada akhirnya, lanjut Farhan, memang harus diputuskan sejauh mana negara menerima hadirnya teknologi digital dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. "Termasuk risiko terhadap perlindungan data pribadi kita," imbuhnya.

Meski banyak tantangan, perkembangan teknologi digital tidak harus serta merta ditolak karena banyak juga membawa manfaat. Farhan mencontohkan, salah satu manfaatnya ialah demokratisasi ekonomi. "Teknologi digital sebagai salah satu platform untuk meluaskan demokrasi, salah satunya demokrasi ekonomi. Yang kita harapkan demokratisasi ekonomi lewat dunia digital akan menghilangkan gap si kaya dan si miskin," pungkasnya.

bia/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Indonesia-Vanuatu Sepakat Perkuat Hubungan Diplomatik

Kerja Sama di Sejumlah Sektor

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Pemerintah Vanuatu yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat. Selama pertemuan berlangsung, baik dari Komisi I DPR dan Pemerintah Vanuatu sepakat untuk menguatkan kerja sama bilateral parlemen maupun menggali opsi kerja sama di sejumlah sektor.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai memimpin kunjungan kehormatan tersebut di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (19/6). Dengan adanya kemauan yang baik antara Indonesia dan Vanuatu, sebutnya, berpotensi menciptakan hubungan yang harmoni sekaligus selaras di kawasan Asia Pasifik.

"Parlemen (Indonesia) betul-betul *support* untuk kunjungan (Pemerintah Vanuatu) ini dan kita harap dari kunjungan ini pemerintah (Indonesia dan Vanuatu) bisa saling *follow-up* untuk hal-hal yang *feasible*. (Kami setuju) membentuk kerja sama bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Vanuatu yang akan terlaksana dalam waktu dekat," ungkap Meutya kepada **Parlementaria**.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat menekankan bahwa kunjungan Pemerintah Vanuatu ke Indonesia untuk menegaskan hubungan baik antara Indonesia dan Vanuatu. Dirinya pun sepakat bahwa Pemerintah Vanuatu siap melakukan eksplorasi kerja sama di sejumlah sektor dengan Indonesia.

FOTO : RSB/PDT

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai menerima kunjungan kehormatan Pemerintah Vanuatu yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Kami sangat serius untuk meninjau perjanjian bilateral. Jadi saya datang ke sini untuk secara khusus menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Vanuatu yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jotham Napat dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Jumat (16/6) lalu. Senada, pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama bilateral.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa ada tiga bidang kerja sama penting yang disorot. Pertama, kerja sama ekonomi dan komitmen memperkuat perdagangan sekaligus meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu. Kedua, kerja sama dalam bidang pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Terakhir, dalam bidang kemitraan di Pasifik, Indonesia dan Vanuatu akan mencari solusi bersama dalam menghadapi isu perubahan iklim hingga maritim. **ts/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Aminurokhman Minta Penyelenggara Pemilu Harus Transparan, Akuntabel, dan Objektif

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta penyelenggara Pemilu mengedepankan dan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Menurutnya, jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki hal-hal tersebut, maka Pemilu tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia.

"Dalam setiap rapat dengar pendapat dengan KPU RI dan Bawaslu RI, saya selalu menekankan perlunya transparansi, akuntabel, dan objektif. Dengan pendekatan ini tentu bisa menghasilkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni," ungkap Aminurokhman dalam keterangan kepada **Parlementaria**, Rabu, (21/6).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan, penyelenggara pemilu melibatkan banyak orang, bila ada hal-hal yang diduga tidak *fair*, ada kecurangan, tidak transparan maka akan muncul gejolak dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Termasuk dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia harus mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan objektivitas agar tidak menimbulkan kekisruhan," jelas Amin.

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman.

FOTO: MRI/PDT

Pernyataan Amin tersebut menanggapi adanya aduan kepada dirinya terkait dugaan proses Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023-2028 yang tidak transparan, akuntabel, dan objektif. Hal ini dapat dilihat dari dua Pengumuman Hasil Tim Seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang berbeda. Satu hasil tes tertanggal 14 Juni 2023 dan satu lagi tertanggal 15 Juni 2023. Meski ditulis dengan nomor surat yang sama, kedua hasil tim seleksi tersebut berisi empat nama yang berbeda.

"Ini tentu harus dilakukan klarifikasi dan investigasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di daerah yang menggelar seleksi dan proses seleksi itu sendiri," ungkap Amin.

Amin juga mengingatkan Papua Barat Daya (PBD) adalah provinsi yang baru dimekarkan, sehingga penyelenggara pemerintahan butuh kepercayaan dari masyarakat. "Dalam memasuki tahun politik ini, diharapkan penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu, harus bisa memberikan bukti kepada masyarakat bahwa mereka bisa dipercaya. Bila di awal pemerintahan Papua Barat Daya ini masyarakat sudah tidak lagi percaya, maka provinsi tersebut akan mengalami kendala dalam pelaksanaan pemerintahan," pungkas Amin. **we/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi III Dorong Kemenkum HAM RI Tingkatkan Kualitas dan Integritas Pegawainya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham RI. Dalam rapat ini kedua belah pihak membahas tentang Sistem Tata Kelola SDM dan Sistem Meritokrasi.

Pangeran menyampaikan, bahwa Komisi III ingin mengetahui bagaimana perencanaan dan pengelolaan sumber daya organisasi termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan program pendidikan sampai dengan integritas SDM yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.

"Komisi III juga ingin mengetahui sistem rekrutmen, rotasi, dan mutasi, termasuk sistem penempatan SDM dan pengisian jabatan sesuai dengan sistem meritokrasi," papar Pangeran di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Dalam rapat ini, Komisi III DPR RI meminta Sekjen Kemenkumham RI agar mendukung upaya peningkatan kualitas dan integritas pegawai maupun indeks reformasi birokrasi melalui tata kelola Sumber Daya Manusia berbasis *good governance*, serta mendorong motivasi dan profesionalisme kerja.

Komisi III juga mendukung Sekjen Kemenkum HAM RI dalam melakukan perencanaan dan koordinasi yang terukur dan berkesinambungan untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi Kemenkumham, khususnya dalam melaksanakan reformasi kultural dan struktural serta meningkatkan transformasi pelayanan publik.

Selain itu Komisi III meminta Sekjen Kemenkumham RI untuk mengoptimalkan tata kelola pengembangan karir pegawai melalui sistem merit dan *reward and punishment* yang tegas, jelas, adil, dan objektif; serta melakukan pengisian jabatan atau penempatan pegawai di seluruh unit dan satuan kerja berbasis kompetensi dan kebutuhan.

Di lain pihak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto menyampaikan, bahwa lembaganya akan berupaya menciptakan SDM yang berkinerja secara efektif efisien untuk melakukan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel. Dia juga mengungkapkan, proses penerimaan sekolah kedinasan dimulai dari April s.d Oktober 2023. Ada pun proses penerimaan CASN direncanakan September 2023 s.d penetapan NIP.

"Kami sampaikan kepada pimpinan di dalam proses maupun mekanisme di lapangan (dalam proses rekrutmen) kita menghindari pertemuan langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," ujar Andap.

ssb/aha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.

FOTO: JKA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Arsul Sani Minta Polri Prioritaskan Penyelidikan Dugaan Hukum Pidana Ponpes Al-Zaytun

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Bareskrim Polri untuk memprioritaskan penyelidikan dugaan hukum pidana terkait polemik di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Hal itu senada dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu bahwa ada aspek hukum pidana yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut berinisial PG.

"PPP meminta Bareskrim Polri memprioritaskan penyelidikan pidana kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, PG (Panji Gumilang). Apalagi lagi Kemenko Polhukam telah dengan jelas mengindikasikan aspek pidana dalam kasus tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (29/6).

Arsul menilai perilaku atau ucapan Panji Gumilang patut diduga sebagai delik pidana, setidaknya pidana penodaan agama. "Jika prioritas penanganan tidak diberikan, PPP melihat bahwa isu-isu bahwa ada tokoh-tokoh yang membekingi PG itu akan dianggap sebagai kebenaran dan ini akan membuka ruang kegaduhan sosial yang membesar," ucap Politisi PPP ini.

Arsul memahami penanganan kasus seperti polemik Al Zaytun memerlukan kerja yang lebih dalam mengungkap fakta. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Bareskrim Polri mendengarkan kesaksian para ulama dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"PPP memahami bahwa kasus-kasus dugaan penodaan agama seperti itu, selain memerlukan kompilasi fakta dan keterangan saksi plus alat bukti lainnya, maka diperlukan pula keterangan ahli. Untuk ini kami menyarankan Bareskrim mendengarkan para ulama dari berbagai ormas Islam arus utama, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan yang lainnya," ujarnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada aspek hukum pidana terkait polemik Ponpes Al-Zaytun. Dia mengatakan aspek hukum pidana tidak boleh diambangkan.

"Al-Zaytun itu ada aspek hukum pidana, yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan, tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung, lalu ada hambatan sana-sini ndak jalan, ndak jelas," ujar Mahfud di Semarang, Kamis (29/6).

Mahfud mengatakan tidak ada target waktu untuk penyelesaian polemik Al-Zaytun. Dia menegaskan masalah Ponpes Al-Zaytun segera dituntaskan karena ada aspek pidana. "Ndak ada, kalau hukum, ndak ada target waktunya, tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana," ujar dia.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

Scan QR untuk berita selengkapnya

FOTO:JKA/PDT

Ansy Lema: BSIP TRI Sukabumi Bisa Jadi *Benchmark* Dikembangkan di Seluruh Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP TRI) Tanaman Industri dan Penyegar, di Sukabumi, Jawa Barat, bisa jadi *benchmark* untuk dikembangkan di seluruh Indonesia. BSIP TRI mengembangkan semacam nursery, yaitu pusat pembenihan dan pembibitan. Karena itu, ia meminta agar bibit dan benih yang dihasilkan memiliki standar, mutu, dan kualitas yang baik. Sehingga, dengan standar dan mutu yang baik akan menentukan produktivitas dan kualitas hasil dari aktivitas produksi pangan.

"Komisi IV juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan mereka ke depan, antara lain seperti, fasilitas dan anggaran. Kami juga ingin pusat-pusat seperti ini dapat dikembangkan di sejumlah tempat di seluruh Indonesia, sehingga kualitas dan produk yang dipasarkan kepada masyarakat luas dan juga petani dapat dipertanggungjawabkan dengan produk unggulan dan kualitas yang baik," jelas Ansy Lema usai melakukan pertemuan dengan jajaran BSIP TRI, di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (20/6).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan di BSIP TRI ini juga mengedepankan badan standarisasi yang juga memeriksa betul bahwa benih atau bibit yang dihasilkan, memiliki standarisasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang berdasarkan ilmu-ilmu pertanian. Jadi, tambahnya, semangat yang dikembangkan adalah pertanian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan.

"Sehingga, hadirnya lembaga tersebut bisa mendekatkan pusat benih, dengan masyarakat tadi (yang) sempat didiskusikan pada pertemuan, di Jawa Barat. Ada juga antusiasme ataupun semangat masyarakat untuk mengembangkan benih sendiri, namun hal ini harus dengan pengawasan yang ketat dengan edukasi dan pendampingan. Sehingga masyarakat itu bisa juga menghasilkan benih berkualitas dan memenuhi standarisasi sebagaimana yang sudah distandarisasinya oleh Kementrian Pertanian," pungkasnya.

Seperti diketahui, BSIP TRI menghasilkan sejumlah varietas unggulan seperti kopi, kakao, B 100, dan sebagainya. Keberadaan produsen benih unggul yang mempunyai kompetensi yang memadai (bersertifikat) dalam produksi dan peredaran benih unggul bermutu sangat penting dalam mendukung Pembangunan Industri perbenihan menuju Kemandirian Industri Perbenihan Perkebunan Nasional. **rni/rdn**

FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema saat melakukan Kunspek Komisi IV DPR RI ke BSIP TRI dalam rangka melihat pengembangan tanaman-tanaman industri, rempah-rempah dan penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (20/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Peran KLHK Dipertanyakan, Riezky Aprilia: Apakah PP Ekspor Pasir Laut Bisa Direvisi?

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mempertanyakan bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengawasi kegiatan pengerukan pasir laut pasca ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui, PP 26/2023 berkaitan dengan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Belakangan, publik menilai PP tersebut menjadi persoalan karena mengizinkan pengerukan pasir di laut untuk diekspor.

Di sisi lain, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk beberapa program menjaga kawasan hutan dan lingkungan. Ia pun berharap KLHK bisa bijak dalam mengelola anggaran tersebut nantinya.

"Saya berharap KLHK dapat menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan, daripada menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini hanya saran dari saya sebagai mitra, agar anggaran dapat dialokasikan dengan bijak," ujar Riezky dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dan jajaran di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/6).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan apakah masih ada peluang untuk memperbaiki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Diketahui, PP ini telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

"Saya ingin memahami apakah masih ada ruang untuk memperbaiki (revisi) PP ini jika ada masukan dan saran yang diberikan. Kita tidak ingin revisi UU Nomor 5 tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) yang sedang dibahas di Komisi IV menjadi tidak produktif karena isu yang timbul dari PP tersebut," papar Legislator Dapil Sumatera Selatan I ini.

> SAYA BERHARAP KLHK DAPAT MENJALANKAN PERANNYA DENGAN BAIK DALAM MENJAGA KAWASAN HUTAN DAN LINGKUNGAN, DARIPADA MENGGUNAKAN ANGGARAN UNTUK HAL-HAL YANG TIDAK PRODUKTIF. INI HANYA SARAN DARI SAYA SEBAGAI MITRA, AGAR ANGGARAN DAPAT DIALOKASIKAN DENGAN BIJAK

Meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990, Riezky menyatakan bahwa akan menjadi situasi yang lucu jika PP-nya ternyata bertentangan dengan UU tersebut.

"Meskipun secara hukum tidak ada keterkaitan, namun akan terasa aneh jika ada perbedaan antara aturan di atas dengan aturan di bawah, yaitu PP yang berantakan," tutup Riezky. **we/aha**

FOTO:EOT/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dan jajaran di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/6/23).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Legislator Dukung Normalisasi Sungai Batang Lembang dan *Flyover* Sitinjau Lauik Sumbar

Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi mendorong penuh pembangunan dua proyek strategis di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Proyek tersebut adalah normalisasi Sungai Batang Lembang dan *flyover* di Sitinjau Lauik.

Diketahui, normalisasi sungai Batang Lembang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir tahunan dalam skala besar si Kabupaten Solok. Proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2018 itu diperkirakan bakal rampung pada tahun 2023 ini. Athari mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dengan cekatan memberikan keperluan masyarakat.

"Sungai Batang Lembang ini mengaliri tiga kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sungai itu panjang sekali dan setiap tahun banjir. Normalisasi Batang Lembang ini setiap tahunnya kita cicil, jadi perlahan-lahan semua kita perbaiki dan alhamdulilah tiap tahun itu pelan-pelan mulai diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui usulan kami dari Komisi V," ujarnya kepada **Parlementaria** usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis (22/06).

Athari kemudian memaparkan perjalanan ide pembuatan *flyover* di Sitinjau Lauik. Sitinjau Lauik adalah lajur jalan yang terbentang sepanjang 1,8 kilometer. Dengan bentuk jalan berkelok yang ekstrem, Athari memandang perlu adanya pembuatan jalan di tempat tersebut tanpa menghilangkan kekhasan dari Sitinjau Lauik.

Legislator Daerah Pemilihan Sumbar I tersebut mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sudah meninjau Sitinjau Lauik pada tahun lalu. Basuki, kata Athari, sangat takjub dengan Sitinjau Lauik. Basuki pun ungkap Athari mendukung ide pembuatan *flyover* di sana.

"Melihat dari kondisi di Sitinjau Lauik dengan jalan yang berkelok-kelok tajam dan juga tanjakan yang cukup tajam, beliau (Menteri PUPR) mendukung sekali rencana pembangunan *flyover* ini," ujar Athari.

Selanjutnya, Ia berkata bahwa Komisi V akan mengawasi progres pembangunan di tempat itu. Ia berharap keduanya bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan waktu yang sudah dicanangkan.

"Tentu saja kami terus memberikan dorongan terutama dalam mengatur anggaran. Nah, itu juga kami terus mengawasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terutama sebagai perpanjangan tangan masyarakat tentu kami menyampaikan terus segala aspirasi (pembangunan)," tutupnya. **ndn/rdn**

FOTO: NDN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis (22/06/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Sri Rahayu Apresiasi SAR Banjarmasin atas Pengabdian kepada Masyarakat

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengapresiasi kerja Basarnas (SAR) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apresiasi itu atas minimnya anggaran yang ada tapi masih dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan, ia menilai, para pekerja Basarnas itu tak pernah memikirkan soal honorarium atau tidak, yang terpenting dapat kerja bersama masyarakat.

"Terkait pelajaran bersama masyarakat melakukan pekerjaannya atau begitu mendadak, ada bencana yang penting bagaimana mereka terjun membantu masyarakat. Itulah yang perlu kita apresiasi. Makanya teman-teman yang hadir di sini ikut Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari basarnas," jelas Ketua Tim Kunspik Komisi V DPR RI Sri Rahayu ke Banjarmasin, Kalsel, Kamis (22/6/2023).

> TERKAIT PELAJARAN BERSAMA MASYARAKAT MELAKUKAN PEKERJAANNYA ATAU BEGITU MENDADAK, ADA BENCANA YANG PENTING BAGAIMANA MEREKA TERJUN MEMBANTU MASYARAKAT, ITULAH YANG PERLU KITA APRESIASI.

Legislator Dapil Jatim VI ini menyarankan untuk Basarnas (SAR) Banjarmasin untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat ataupun perusahaan untuk pelatihan besar bersama masyarakat. Ia menjelaskan walaupun memiliki personel yang terbatas, tapi diharapkan dapat masyarakat sekitar dapat terbantu dengan pelatihan yang ada dari Basarnas.

"Maka kami sangat mendorong masyarakat bisa bekerja sama dengan Basarnas untuk mengadakan pelatihan. Termasuk di sini kan mungkin banyak perusahaan-perusahaan, paling tidak membantu apakah personelnya mereka yang diberikan pelatihan di sini atau membantu dalam hal biaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan bersama dengan Basarnas. Kerja sama itu menurut saya penting karena untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Marsekal Roy Romanza menyampaikan kesan dan harapannya karena telah dikunjungi oleh Komisi V DPR RI. Roy mengatakan kunjungan kerja spesifik ini sangat produktif agar Anggota DPR RI melihat sendiri fasilitas unit SAR di Banjarmasin ini seperti apa dengan segala keterbatasannya.

mri/rdn

FOTO:MRI/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu saat memimpin Kunspik Komisi V DPR RI ke Basarnas (SAR) Banjarmasin, Kalsel, Kamis (22/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi VI Dorong Peran PT Pegadaian Pulihkan Ekonomi Pasca Pandemi

FOTO: RIA/PDT

Ketua Tim Kunspik Subardi saat memimpin pertemuan Kunjungan Spesifik (Kunspik) ke PT Pegadaian di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/6/2023).

Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspik) ke PT Pegadaian di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/6). Ketua Tim Kunspik Subardi mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja mitra kerjanya.

"PT Pegadaian memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Untuk itu, dalam pertemuan ini, kami (Komisi VI) ingin mendengarkan secara langsung upaya peningkatan kinerja PT Pegadaian disertai *roadmap* guna mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional," jelasnya.

PT Pegadaian merupakan BUMN yang memiliki tujuan untuk mencegah ijon, rentenir, pinjaman tidak wajar, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

"Untuk itu, dalam kondisi ekonomi pasca pandemi seperti saat ini, PT Pegadaian sebagai *agent of development* diharapkan mampu mengambil peran dalam pemulihan perekonomian nasional melalui pelaksanaan program-program dukungan pemerintah dan program strategis nasional secara tepat sasaran dan efisien," katanya.

Dalam pertemuan, Komisi VI mengapresiasi kolaborasi antara PT Pegadaian, Bank BRI, dan PNM yang selanjutnya disebut *Holding Ulta* Mikro dalam menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku usaha mikro di Indonesia untuk dapat berkembang, berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Kolaborasi ketiga etitas tersebut, dinilai Subardi semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan secara terintegrasi. "Kami melihat ini inovasi yang positif. Kami meminta hal baik ini terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tagline 'menyelesaikan masalah tanpa masalah' benar benar teralisasi ditengah pemulihan ekonomi saat ini," pungkas Legislator Fraksi Partai NasDem itu. **rnm/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Bio Farma Grup Diharap Lakukan Penyesuaian Kondisi Pasar Pasca Pandemi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Bio Farma (Persero) di Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja spesifik ini bermaksud untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi dalam rangka Pengawasan Kinerja dan Kontribusi BUMN oleh PT Bio Farma, termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanganannya. Martin Berharap Bio Farma Grup bisa melakukan penyesuaian kerja dengan kondisi pasar pasca pandemi.

Dia mengungkapkan, meskipun terdapat penurunan kinerja di tahun 2022, namun apabila aktivitas terkait Covid dikecualikan, kinerja Bio Farma di tahun 2022 lebih baik dari 2021. "Pada tahun 2023, Bio Farma Grup akan melakukan perbaikan fundamental perusahaan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar kesehatan yang berubah diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi," papar Martin di ruang pertemuan PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/6).

FOTO: SSB/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma (Persero) di Provinsi Jawa Barat, Senin (26/6/2023).

Pada rapat ini dijabarkan, bahwa pendapatan PT Bio Farma secara konsolidasi (holding) mencapai Rp21,539 triliun di tahun 2022 mengalami penurunan 50,4% dari tahun 2021. Secara detail hal ini bisa dilihat pada pendapatan Bio Farma yang mengalami penurunan 63,6% dari tahun 2021 atau mencapai Rp11,026 triliun.

Penurunan tersebut terjadi karena selesainya program vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Sejak berdiri, *Holding* BUMN Farmasi Bio Farma membawa misi untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional di Indonesia. Sehingga, ketika Pandemi melanda negeri Bio Farma berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memerangi Covid-19.

Salah satu upayanya adalah memproduksi vaksin Covid-19 agar terdistribusi secara luas di masyarakat sehingga mempercepat pemulihan. Dengan mengintegrasikan seluruh kompetensi yang dimiliki, dan memadukan seluruh talenta serta kemampuan untuk berinovasi Bio Farma tetap optimistis untuk mempersiapkan program-program transformasi sebagai *roadmap* bagi pengembangan BUMN Farmasi menjadi *Leading Life Science Company* kelas dunia.

ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya

Legislator Nilai *Mandatory Spending* Layanan Kesehatan Kunci Utama Kendalikan Wabah

FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat mengisi acara Forum Legislasi dengan tema "Efektifitas RUU Kesehatan Mengendalikan Penyakit Menular", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan besaran persentase *'mandatory spending'* layanan kesehatan menjadi hal penting untuk menjamin kelancaran pengendalian wabah. Hal ini disampaikannya dalam acara Forum Legislasi dengan tema "Efektifitas RUU Kesehatan Mengendalikan Penyakit Menular", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7).

Merujuk pada undang-undang eksisting, kata Kurniasih, besaran *'mandatory spending'* atau pengeluaran negara yang diatur undang-undang ditetapkan minimal sebesar lima persen untuk APBN dan masing-masing APBD. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi panduan sebesar 15 persen untuk alokasi dana kesehatan di setiap negara.

"Dari berbagai ketentuan penanggulangan wabah dalam RUU Kesehatan, yang kami sesalkan hilangnya 'mandatory spending'. Karena bicara wabah, membutuhkan biaya yang besar. Setidaknya kembali ke UU eksisting minimal lima persen untuk APBN dan APBD, walau kami mintanya 10 persen," kata Legislator Fraksi PKS itu.

Kurniasih mengatakan nomenklatur wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) diatur di Bab 12 RUU Kesehatan Omnibus Law Pasal 352 sampai 400. Hal penting yang diatur antara lain, kata dia, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan tenaga medis, pakar, TNI-Polri, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan agama.

Aturan tersebut juga memuat penetapan penyakit yang berkriteria wabah, kewaspadaan wabah di wilayah dan pintu masuk, penanganan daerah wabah, hingga kegiatan pasca-wabah. RUU Kesehatan juga mengatur pengelolaan limbah medis seperti pembuangan masker, jarum suntik, dan infus bekas di masa wabah.

Bagian Keenam Pasal 386-391 RUU Kesehatan, kata Kurniasih, juga mengatur tentang SDM, teknologi, sarana prasarana, perbekalan kesehatan, dan pendanaan. "Ibarat tubuh manusia, anggaran ini seperti darahnya. Konsep kesehatan sebaik apapun kalau anggaran tidak disiapkan pasti tidak mudah," katanya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghapus pengeluaran wajib itu dalam RUU Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 401 ayat 2 dan 3. Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi pemerintah terhadap penyerapan anggaran pengeluaran wajib tidak 100 persen mencapai tujuan. **tn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi X Dorong Pariwisata Lombok Bangkit Mendunia

Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kunspik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang berada di bawah Kemenparekraf/Baparekraf RI.

"Pertemuan kali ini saya kira sangat produktif sekali, di mana keberadaan Poltekpar di Lombok ini bukan hanya memberikan edukasi persoalan pendidikan, tetapi ada prioritasnya yaitu pariwisata. Dalam pertemuan ini kita juga berupaya mencari solusi yang terbaik agar pariwisata di Pulau Lombok menjadi semakin bangkit dan mendunia," ucap Haerul Amri kepada **Parlementaria**, di Kampus Poltekpar Lombok, NTB, Kamis (22/6).

Ia mengatakan, satu hal yang menarik dari pariwisata di Lombok yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu adanya sirkuit Moto GP Mandalika. Meski demikian, masih ada beberapa permasalahan di Lombok yang perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, yakni menyangkut soal infrastruktur sebagai sarana pendukung kemajuan sektor pariwisata.

> HAL YANG PERLU DIPERBARUI UNTUK MENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI LOMBOK INI ADALAH MENGENAI MASALAH INFRASTRUKTUR.

"Hal yang perlu diperbarui untuk mendukung kepariwisataan di Lombok ini adalah mengenai masalah infrastruktur. (Yaitu agar) bagaimana Pemerintah Pusat dan Kabupaten bisa menangani soal infrastruktur yang memadai. Dis amping itu juga mengenai aksesibilitas pendukung lainnya seperti harga tiket pesawat yang lebih terjangkau seperti harapan banyak pihak. Sebab tidak semua wisatawan itu orang yang berduit, tetapi juga turis-turis lokal yang mungkin dari segi dananya terbatas," ungkapnya.

Sementara itu, terkait Poltekpar Lombok, Amri menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam rapat-rapat bersama Komisi X DPR RI, disebutkan bahwa Poltekpar Lombok mendapatkan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu berdasarkan dari aspek programnya yang digunakan untuk pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata dan pengembangan pusat unggulan.

Adapun Kunspik ini dihadiri pula dari jajaran Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, organisasi kepariwisataan di NTB, serta para pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. "Poltekpar Lombok ditekankan untuk bisa mengembangkan pusat unggulan dalam wisata halal," tutur politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

dep/rdn

FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kampus Poltekpar Lombok, NTB, Kamis (22/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Perlu Terobosan Bagi BPKP dalam Mengawal Pembangunan Nasional

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu melakukan terobosan-terobosan dalam mengawal pembangunan nasional. BPKP, sebagai internal auditor pemerintah, diharapkan mampu menyusun suatu sistem kontrol yang kuat agar dapat meminimalisir adanya temuan-temuan.

"Dalam pikiran saya BPKP sebagai internal auditornya pemerintah (harus) mampu untuk menyusun satu sistem kontrol yang kuat, kemudian eksternal auditor BPK dalam hal ini mestinya nggak terlalu lagi banyak temuan-temuan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta agar Komisi XI dan BPKP dapat melakukan diskusi untuk memperkuat sistem kontrol di BPKP sebagai internal auditor. Agar *auditee* (pihak yang diaudit) dapat menjalankan berbagai program dengan 'pagar-pagar' yang sudah didefinisikan secara jelas dan detail. Sehingga, hal ini dapat meminimalisasi adanya temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal.

FOTO: MUN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

> **DALAM PIKIRAN SAYA BPKP SEBAGAI INTERNAL AUDITORNYA PEMERINTAH (HARUS) MAMPU UNTUK MENYUSUN SATU SISTEM KONTROL YANG KUAT, KEMUDIAN EKSTERNAL AUDITOR BPK DALAM HAL INI MESTINYA NGGAK TERLALU LAGI BANYAK TEMUAN-TEMUAN**

"Untuk menghindarkan berbagai potensi-potensi kebocoran di sana-sini maka perlu *warning system* segera penting untuk lebih lanjut lagi dikembangkan oleh BPKP. Sekali lagi sebagai internal auditornya pemerintah supaya tadi nanti audit dari BPK itu menjadi minimal. Temuan-temuannya kalaupun ada sesuatu yang tidak kemudian berkorelasi dengan potensi kerugian negara," pungkasnya.

Adapun Peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional, pertama sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan melakukan pengawalan pembangunan nasional/daerah, pengamanan keuangan negara/daerah, pengamanan aset negara/daerah, dan peningkatan tata kelola. Kedua, BPKP sebagai coordinator/pengarah pengawas internal K/L/D/BUMN(D). **gal/rdn**

Baleg setujui RUU Desa jadi inisiatif DPR

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. "Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui?" ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno penyusunan RUU Desa di Ruang Rapat Baleg DPR, di Jakarta, Senin (3/7).

Pertanyaan tersebut lekas dijawab setujui oleh jajaran anggota Baleg dan disambut ketukan palu yang meresmikan putusan rapat pleno. Rancangan tersebut kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perekembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

"Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI," tegasnya.

Berdasarkan itu, lanjut Supratman menyampaikan hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain; Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan.

Penyisipan satu pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

"Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia," pungkasnya.

rnm,ann/aha

FOTO: DEP/PDT

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi bersama anggota Baleg lainnya saat foto bersama usai rapat pleno penyusunan RUU Desa di Ruang Rapat Baleg DPR, di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Kunjungan Delegasi **Parlemen Australia Jembatan Pererat Hubungan dengan Indonesia**

FOTO: EOT/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Australia di Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyambut baik kunjungan delegasi Parlemen Australia sebagai jembatan untuk semakin mempererat hubungan antar manusia (*people to people*). Fadli menyatakan, kunjungan delegasi antar Parlemen khususnya kunjungan dari Parlemen Australia selalu akan menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Australia dalam keadaan sangat baik.

"Dan hubungan yang baik itu tentu akan meningkatkan hubungan yang lebih menguntungkan lagi terutama di bidang ekonomi, di bidang bisnis, di bidang usaha, apalagi di Australia juga banyak sekali investasi dari kedua negara. Selain itu di bidang pendidikan banyak sekali mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia demikian juga sebaliknya," ujar Fadli kepada Parlementaria usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Australia di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/6).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan hubungan kondusif kedua parlemen harus terus dipertahankan. "Agar kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan nasional, kepentingan usaha kita dan juga kepentingan-kepentingan internasional. Termasuk integritas wilayah kita tidak ada yang mempersoalkan persoalan-persoalan yang terkait dengan adanya upaya separatisme dan lain sebagainya," tandas Fadli.

Selain itu, Fadli mengapresiasi Parlemen Australia yang *concern* terhadap permasalahan kawasan ASEAN, salah satunya soal Myanmar yang sedang mengalami persoalan kudeta. Tak hanya itu, pada saat pertemuan, Parlemen Australia juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah berkunjung ke kamp pengungsian sekitar 920.000 pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar yang berada di refugee camp Cox's Bazar, Bangladesh.

"Saya pernah juga memimpin delegasi tahun 2017 ke Cox's Bazar dan kita melihat bahwa ini menjadi satu kamp terbesar di dunia. Mungkin sekarang ada lebih dari 1 juta orang. Mereka *concern* terhadap persoalan ini dan mereka juga *concern* terhadap persoalan kudeta di Myanmar. Tentu mereka berharap Indonesia bisa menjadi salah satu yang bisa menyelesaikan persoalan ini, apalagi sekarang menjadi Ketua dari ASEAN, Ketua dari AIPA dari sisi Parlemen," pungkas Fadli.

Hadir delegasi Parlemen Australia yaitu Pimpinan Delegasi Meryl Swanson (Partai Buruh), Pimpinan Delegasi Senator Hollie Hughes (Partai Liberal), lalu Senator Dorinda Cox (Partai Hijau Australia). Kemudian Parlemen Australia Barat Martin Aldridge (Nasional), Dewan Kota Brisbane Councellor Andrew Wines (Partai Liberal), Penasihat Senior untuk Senator Gleen Sterle yaitu Ben Wholagan dari Partai Buruh Australia. **pun/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

LENSA PARLEMEN

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI-Parlemen Jepang Puti Guntur Soekarno saat menerima kunjungan kehormatan Parlemen Jepang di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
FOTO: MRI/PDT

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI-Parlemen Jepang Puti Guntur Soekarno saat menerima kunjungan kehormatan Parlemen Jepang di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
FOTO: AYU/PDT

Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPR RI Indra Iskandar saat mengikuti Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI tahun 2023 di Makkah, Jumat (23/6/2023). FOTO:JKA/PDT